



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Kebijakan Pendidikan Gratis Nasional: Dampak terhadap Akses, Kualitas, dan Pemerataan Pendidikan Dasar

National Free Education Policy: Impact on Access, Quality, and Equity of Basic Education

Aidil¹, Septiyan Sari², Melita Tantular³, Madi⁴, Ani Zulaikhah⁵, Eri Dianti⁶, Darwin Efendi⁷, Akbar Riansyah⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Palembang – Indonesia

***Corresponding Author: E-mail: aidilwg8@gmail.com¹, septiyansari2@gmail.com², tantularmelita@gmail.com³, madisangkut1212@gmail.com⁴, anizuahir26@gmail.com⁵, diantieri2@gmail.com⁶, darwinpasca2010@gmail.com⁷, akbariansyah@univpgri-palembang.ac.id⁸**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 12 Feb, 2026

Revised: 27 Mar, 2026

Accepted: 22 Apr, 2026

Kata Kunci:

Akses Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah, Indonesia Pintar, Kebijakan Publik, Kualitas Pendidikan, Pemerataan Pendidikan

Keywords:

Access to Education, School Operational Assistance, Smart Indonesia, Public Policy, Education Quality, Education Equity

DOI: 10.56338/jks.v9i4.10881

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan strategi krusial pemerintah Indonesia untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap tiga dimensi utama: aksesibilitas, kualitas pembelajaran, dan pemerataan layanan pendidikan dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis 20 referensi kunci yang terdiri dari jurnal ilmiah dan buku teks terbitan 2017-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara signifikan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menurunkan angka putus sekolah akibat kendala ekonomi. Namun, aspek kualitas pendidikan masih sangat bergantung pada manajemen sekolah dan kemampuan awal siswa, di mana intervensi finansial tidak selalu berbanding lurus dengan prestasi akademik. Selain itu, disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) tetap menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan yang substansial. Kesimpulannya, meskipun akses telah terbuka lebar, pemerintah perlu mereformasi mekanisme penyaluran dana dan meningkatkan standar sarana-prasarana digital guna menjamin mutu pendidikan yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

ABSTRACT

The national free education policy, implemented through School Operational Assistance (BOS) and the Indonesia Smart Program (PIP), serves as a crucial government strategy to fulfill the constitutional mandate of educating the nation. This study aims to analyze the impact

of these policies on three primary dimensions: accessibility, quality of learning, and equity in basic education services. The research method employed is a literature review (library research) using a qualitative descriptive approach, analyzing 20 key references including scientific journals and textbooks published between 2017 and 2025. The results indicate that the policy has significantly increased School Enrollment Rates (APS) and reduced dropout rates caused by economic constraints. However, the quality of education remains highly dependent on school management and students' prior abilities, where financial intervention does not always correlate directly with academic achievement. Furthermore, educational disparities between urban areas and Frontier, Outermost, and Terrestrial (3T) regions remain a major obstacle to achieving substantial equity. In conclusion, while access has broadened, the government needs to reform fund distribution mechanisms and improve digital infrastructure standards to ensure inclusive educational quality across all regions of Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi fundamental yang dijamin oleh konstitusi Indonesia guna memastikan keberlangsungan peradaban bangsa. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan amandemen Pasal 31, negara memikul tanggung jawab penuh untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Komitmen ini diwujudkan melalui alokasi 20% anggaran negara yang dialokasikan untuk menghapuskan hambatan finansial, yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mengenyam bangku sekolah. Kebijakan pendidikan gratis yang bertumpu pada dana BOS dan PIP menjadi instrumen utama dalam mentransformasi lanskap pendidikan nasional dari sistem yang elitis menjadi inklusif.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan pembiayaan pendidikan yang telah berjalan selama dua dekade. Meskipun angka partisipasi kasar terus menunjukkan tren positif, berbagai laporan lapangan mengindikasikan adanya paradoks antara kemudahan akses dengan standar mutu yang dihasilkan. Masalah keterlambatan distribusi dana, minimnya sarana di daerah terpencil, serta beban administrasi yang berat di tingkat satuan pendidikan menjadi tantangan sistemik yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional secara utuh. Tanpa analisis yang komprehensif, kebijakan pendidikan gratis berisiko hanya menjadi program populis tanpa dampak substantif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk membedah dampak konkret kebijakan pendidikan gratis terhadap akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dana BOS mendukung operasional institusi dan bagaimana PIP meringankan biaya personal siswa dari keluarga rentan. Lebih lanjut, artikel ini akan mengeksplorasi kesenjangan kualitas antara wilayah urban dan rural serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Melalui sintesis berbagai temuan penelitian terdahulu, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola pembiayaan pendidikan nasional di masa depan.

Kajian Teori

Landasan yuridis utama pembiayaan pendidikan di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 11 ayat 2 secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara usia wajib belajar. Secara teoretis, kebijakan pendidikan gratis merupakan manifestasi dari konsep keadilan sosial (social justice) di mana negara melakukan intervensi fiskal untuk meminimalisir dampak kemiskinan terhadap hak individu. Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan dipandang bukan sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan ekonomi dan mobilitas sosial.

Pencapaian mutu pendidikan dalam kerangka kebijakan pendidikan gratis diukur melalui pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dana BOS dirancang untuk mendukung operasional non-personalia yang mencakup standar sarana prasarana, standar proses, hingga pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi kerangka kerja operasional di mana sekolah diberikan otonomi untuk mengelola dana tersebut secara fleksibel namun tetap akuntabel guna merespon kebutuhan unik peserta didik di masing-masing wilayah. Efektivitas MBS sangat bergantung pada kepemimpinan instruksional kepala sekolah dan partisipasi aktif komite sekolah dalam pengawasan anggaran.

Program Indonesia Pintar (PIP) hadir sebagai pelengkap dana BOS dengan fokus pada bantuan biaya personal bagi siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. PIP berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah dan menjamin keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan PIP sangat ditentukan oleh akurasi data sasaran pada sistem Dapodik dan kemudahan akses perbankan bagi penerima manfaat di daerah terpencil. Namun, tantangan muncul ketika besaran bantuan PIP dinilai belum sepenuhnya mampu menutupi seluruh kebutuhan riil personal siswa di tengah kenaikan inflasi.

Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh interaksi antara dukungan finansial dan kemampuan kognitif awal siswa. Teori Input-Process-Output dalam manajemen pendidikan menekankan bahwa ketersediaan dana (input) harus dikelola melalui proses pembelajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang kompeten (output). Menariknya, studi di wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan sekolah gratis tidak secara otomatis meningkatkan prestasi belajar jika variabel kemampuan awal siswa tidak dikembangkan secara paralel melalui pendekatan pedagogis yang tepat. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi finansial hanyalah prasyarat akses, sedangkan kualitas hasil belajar memerlukan intervensi yang lebih dalam pada aspek kurikulum dan kompetensi guru.

Dimensi pemerataan pendidikan menghadapi tantangan besar akibat kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Kesenjangan antara wilayah perkotaan yang memiliki akses infrastruktur digital lengkap dengan wilayah 3T yang masih minim fasilitas menjadi isu krusial dalam keadilan pendidikan. Kebijakan zonasi dan penyaluran dana BOS berbasis jumlah siswa terkadang justru memperlebar jurang kualitas karena biaya logistik di daerah terpencil jauh lebih tinggi dibandingkan di kota besar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembiayaan yang lebih asimetris dan kontekstual untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan memiliki kapasitas yang sama dalam memberikan layanan pendidikan bermutu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama metode ini adalah mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis data sekunder dari literatur ilmiah yang relevan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan pendidikan gratis. Proses pencarian literatur difokuskan pada jurnal terakreditasi, buku teks manajemen pembiayaan pendidikan, dan laporan evaluasi kebijakan pemerintah yang dipublikasikan dalam rentang waktu tujuh tahun terakhir (2017-2025).

Data dikumpulkan dari 20 referensi kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya terhadap variabel akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan dasar di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital menggunakan pangkalan data seperti Google Scholar, SINTA, dan repositori kementerian terkait. Setiap referensi dibedah untuk mengekstraksi temuan utama mengenai efektivitas dana BOS dan PIP, kendala implementasi di lapangan, serta solusi strategis yang diusulkan oleh para pakar pendidikan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi dampak kebijakan guna melihat pola keberhasilan dan hambatan yang muncul secara konsisten di berbagai daerah. Keabsahan

data dijamin melalui triangulasi sumber, di mana temuan dari jurnal penelitian dibandingkan dengan teori dalam buku teks dan regulasi resmi pemerintah. Hasil akhir dari analisis ini disajikan secara naratif untuk memberikan wawasan mendalam bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pendidikan gratis secara nasional terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perluasan akses pendidikan dasar. Data menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di seluruh jenjang pendidikan sejak penguatan program BOS dan PIP dilakukan secara masif. Program bantuan tunai melalui KIP telah berhasil menarik kembali anak-anak dari keluarga kurang mampu ke dalam sistem pendidikan formal, sehingga hak atas pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana dengan lebih baik. Keberhasilan ini mengkonfirmasi bahwa penghapusan biaya sekolah merupakan langkah awal yang krusial dalam meruntuhkan barrier ekonomi di masyarakat.

Dampak terhadap penurunan angka putus sekolah (drop-out) juga terlihat sangat nyata, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dana BOS memungkinkan sekolah untuk membiayai operasional harian tanpa memungut iuran dari orang tua, sementara PIP memberikan subsidi untuk kebutuhan personal siswa seperti seragam dan alat tulis. Di Kota Sukabumi dan Kota Blitar, misalnya, program ini telah menjamin keberlanjutan studi bagi lebih dari 95% siswa sekolah dasar untuk naik ke jenjang menengah pertama. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pendidikan gratis berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang efektif bagi keluarga rentan. Meskipun akses meningkat, dampak terhadap kualitas pendidikan menunjukkan hasil yang lebih bervariasi. Dana BOS memang berkontribusi pada peningkatan sarana prasarana dan kompetensi guru melalui pelatihan, namun hal ini tidak selalu secara instan meningkatkan prestasi akademik siswa. Studi kritis di DKI Jakarta menemukan bahwa prestasi belajar siswa lebih banyak ditentukan oleh kemampuan awal dan motivasi intrinsik daripada sekadar pembebasan biaya sekolah. Temuan ini memberikan pelajaran berharga bahwa pembiayaan pendidikan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas interaksi pedagogis di dalam kelas agar dana yang dikucurkan memberikan nilai tambah pada kompetensi lulusan.

Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan oleh kebijakan pendidikan gratis saat ini. Terdapat disparitas yang lebar dalam kualitas layanan pendidikan antara sekolah di perkotaan dengan sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Meskipun setiap siswa menerima unit cost BOS yang relatif sama, biaya operasional di daerah terpencil jauh lebih tinggi akibat kendala geografis dan logistik, sehingga daya beli sekolah di pedesaan terhadap sarana berkualitas menjadi lebih rendah dibandingkan sekolah di kota. Kesenjangan infrastruktur digital juga menciptakan hambatan baru dalam pemerataan akses terhadap sumber belajar modern yang kini banyak berbasis daring.

Tantangan tata kelola dan birokrasi penyaluran dana juga kerap menghambat efektivitas kebijakan di lapangan. Masalah klasik keterlambatan pencairan dana BOS dan PIP seringkali memaksa sekolah untuk mencari dana talangan atau berhutang guna menutupi biaya operasional yang mendesak. Selain itu, beban administrasi laporan pertanggungjawaban yang rumit seringkali mengalihkan fokus kepala sekolah dari tugas kepemimpinan instruksional menjadi sekadar manajer keuangan. Transparansi dan akuntabilitas memang mutlak diperlukan, namun sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan sederhana berbasis teknologi sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban kerja guru dan staf administrasi sekolah.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan gratis nasional telah berhasil dalam dimensi kuantitas namun masih memerlukan penguatan dalam dimensi kualitas dan keadilan distributif. Integrasi data antara Dapodik dan sistem perlindungan sosial nasional perlu terus disempurnakan untuk meminimalisir kesalahan sasaran dalam penyaluran PIP. Peningkatan unit cost BOS bagi sekolah di daerah dengan indeks kemahalan konstruksi tinggi dapat menjadi solusi untuk mencapai pemerataan

kualitas sarana. Di masa depan, kebijakan pendidikan gratis tidak boleh hanya berfokus pada "membebaskan biaya", tetapi juga pada "menjamin standar mutu" yang setara bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang geografis maupun ekonomi mereka.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan gratis nasional melalui program BOS dan PIP telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar dan menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Secara konstitusional, kebijakan ini telah memenuhi janji negara untuk memberikan layanan pendidikan tanpa beban biaya bagi masyarakat kurang mampu. Namun, evaluasi mendalam menunjukkan bahwa peningkatan akses belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas hasil belajar yang merata. Prestasi akademik siswa masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal di luar intervensi finansial, dan kesenjangan fasilitas antara wilayah perkotaan serta daerah terpencil masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan pendidikan nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: CV. Cendekia.
- Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Gorontalo: UNG Press.
- Maliki, B. I. (2020). Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Tarbawi*, 5(2), 163-176.
- Nurokhmah. (2021). Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 2(1), 37-48.
- Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Azka Pustaka.
- Pratiwi, D., dkk. (2024). *Kebijakan Pendidikan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Purba, S., dkk. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rahayu, H. S., Amri, F., Maneges, G. A., & Nurdina, S. (2025). Literature Review: Peran Dana BOS dalam Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 790-798.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2), 197-208.
- Sucipto, A., Umami, N., & Hastuti, M. A. S. W. (2026). Kesenjangan Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 259-276.
- Sudarmono. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPIS)*, 2(1), 266-280.
- Supardi, U. S., & Leonard. (2012). *Menakar Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Gratis di DKI Jakarta*. Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI.
- Suyana, N., Dalmeri, Sugiharto, & Jupriadi. (2024). Kebijakan Pendidikan Nasional Menghadapi Tantangan Global. *Journal of Education Research*, 5(1), 1-15.
- Tinggogoy, C. (2019). Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 7(1), 55-69.
- Utami, L. K., & Mahmudin, A. S. (2024). Dampak Sekolah Gratis terhadap Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Pagar Alam. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(1), 807-815.
- Wahyuni, T. (2019). Sekolah Gratis Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia. *Societas*, 8(2), 1-12.

Wairisal, P. L. (2025). *Buku Ajar Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Padang: Gemilang Press.
Zamaludin, M. E., dkk. (2023). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya
Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(1), 60-75.